

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain itu sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional diantaranya, sebagai andalan mata pencarian sebagian besar penduduk, sumbangan terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan dan gizi. Sehingga sektor pertanian juga mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi (Soekartawi, 1995). Berdasarkan data BPS 2014, persentase pekerjaan utama sebesar 34 % diduduki oleh sektor pertanian, hal ini disebabkan oleh Negara Indonesia sebagai Negara Agraris. Sedangkan 66 % lagi terdiri dari sektor lain seperti Industri Pengelolaan, Kontruksi, Perdagangan, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Jasa Kemasyarakatan dsb (Lampiran 1).

Pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha memperbaharui, memperbanyak (reproduksi), dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Pertanian merupakan suatu hubungan kegiatan manusia dengan lahan tertentu yang disertai dengan pertimbangan tertentu pula (Suratiah, 2008: 8).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pertanian adalah adanya kecenderungan menurunnya produktivitas lahan. Disisi lain sumberdaya alam terus menurun sehingga perlu diupayakan untuk tetap menjaga kelestariannya. Demikian pula dalam usahatani padi agar usahatani padi dapat berkelanjutan, maka teknologi yang diterapkan harus memperhatikan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sehingga agribisnis padi dapat berkelanjutan (Kementrian Pertanian, 2010).

Penyebab utama rendahnya produktivitas tanaman padi sawah adalah rendahnya pengisian biji atau masih tingginya gabah hampa 24,2 - 28,2%. Teknik budidaya yang masih dilakukan secara konvensional juga menjadi salah satu penyebab tanaman padi belum dapat mengekspresikan kemampuan genetiknya, pemberian bahan organik mampu meningkatkan hasil gabah pada padi kering secara nyata. (Novianto, 2009). Petani dalam menjalankan usahatannya dibatasi

oleh faktor-faktor produksi yang dikuasainya. Faktor produksi tersebut meliputi: tanah, modal, tenaga kerja, serta pengelolaan usahatani (Djamali, dalam Juhardi, 2005: 26).

Seringkali orang menganggap bahwa tugas dan kepentingan petani hanyalah semata-mata menanam, memelihara dan memetik hasil pertanian. Dengan kata lain hanya merupakan teknis saja, para petani berkepentingan untuk meningkatkan penghasilan pertaniannya dan penghasilan keluarganya (farm-income). Selain besarnya biaya produksi, mereka juga berkepentingan agar biaya produksi pertaniannya dapat ditekan serendah-rendahnya dan penerimaan dari penjualan hasilnya dapat dinaikan setinggi-tingginya, hal inilah yang disebut dengan usahatani yang efisien dan menguntungkan (Mubyarto, 1989: 55).

Dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani padi, perlu adanya peningkatan faktor-faktor produksi dalam usahatani. Faktor produksi yang dimaksud adalah penggunaan benih unggul, curahan tenaga kerja dalam usahatani, peningkatan teknologi pengendalian gulma, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit, pemupukan, serta panan dan pasca panen. Oleh karena itu perlu adanya modal yang tercukupi, teknologi yang adaptif, efektif, dan efisien dalam budidaya padi (Juhardi, 2005: 5).

Dalam proses produksi pertanian untuk dapat menghasilkan output diperlukan penggunaan berbagai input. Input menurut Mosher 1981, dalam Juhardi (2005), diartikan sebagai sesuatu yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh hasil tertentu. Produksi pada hakekatnya merupakan hasil dari faktor pengelolaan dan faktor lingkungan. Faktor pengelolaan meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan, pengolahan tanah, penggunaan pestisida, pengelolaan air, dan pergiliran tanaman. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan fisik (tanah, air, dan cahaya matahari) dan faktor non fisik atau sosial ekonomi, tenaga kerja, modal, pasar, dan sebagainya.

Tinggi rendahnya produksi sangat ditentukan oleh pengalokasian dari faktor produksi. Hal ini mutlak diperlukan untuk memperoleh produksi yang diinginkan. Produksi dapat dinaikkan dengan mengubah kondisi penggunaan faktor produksi secara optimal (Mubyarto 1995, dalam Juhardi 2005). Oleh karena itu diperlukan modal yang tercukupi oleh petani dalam kegiatan usahatani sehingga petani dapat menggunakan faktor-faktor produksi secara optimal.

Masalah-masalah pertanian yang berada di Indonesia yang tercantum dalam konsep pembangunan nasional dalam Annisa (2013) bahwa jumlah petani yang pada saat ini mencapai 25 juta kepala keluarga tani, memiliki pendidikan formal yang rendah, rendahnya pendidikan formal yang dimiliki oleh petani menyebabkan pengetahuan terhadap pemakaian atau penyerapan informasi terhadap teknologi baru menjadi rendah sehingga produktivitas keluarga menjadi rendah. Kondisi petani yang seperti ini akan mengakibatkan pertanian di Indonesia sulit untuk dikembangkan. Permasalahan selanjutnya tidak adanya organisasi petani di pedesaan, ketiadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran petani untuk berorganisasi (Annisa, 2013: 1).

Ciri khas kehidupan petani dan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi petani adalah perbedaan pola pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen saja, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu bahkan kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum musim panen tiba baik itu pengeluaran untuk biaya produksi seperti pengerjaan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan dan biaya panen maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang sangat merugikan petani adalah pengeluaran-pengeluaran besar petani yang tidak dapat diatur dan tidak dapat diganggu sampai panen tiba (Mubyarto, 1989: 36-37).

Batasan petani kecil telah disepakati pada seminar petani di Jakarta pada tahun 1979 yang menetapkan bahwa yang dinamakan petani kecil salah satunya adalah petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar lahan sawah di Jawa atau 0,5 hektar diluar Jawa (Soekartawi dkk, 1984). Dengan lahan yang sempit tersebut petani berupaya melakukan berbagai hal dalam usahatani agar dapat menambah produksi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh beberapa petani dilakukan dengan cara meminjam modal kepada Lembaga Keuangan Mikro.

Munculnya masalah-masalah pertanian seperti yang tercantum dalam petani sebagai pelaksana kegiatan usahatani mengharapkan produksi yang lebih besar agar memperoleh pendapatan yang lebih besar pula. Untuk itu petani menggunakan tenaga, modal, dan sarana produksi untuk memperoleh hasil produksi yang tinggi. Suatu usahatani dikatakan berhasil apabila usahatani tersebut mampu memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga luar, serta sarana produksi lain (Suratiah, 2008: 60).

Masalah permodalan yang menimpa petani ditandai dengan sulitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh modal, serta ada jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak ingin mengambil resiko pada usaha kecil. Sedangkan petani kecil tidak memiliki jaminan (*collateral*) yang sesuai dengan persyaratan perbankan. Hal lainnya yang memberatkan adalah mekanisme perbankan yang menurut penduduk pedesaan menyulitkan, sangat birokratis dan biaya transaksinya mahal. Selain masalah akses, rendahnya nilai pinjaman biasanya tidak disertai dengan kemudahan dan pelayanan yang sesuai standar (Kusumaningtyas dan Kuswanti, 2012: 70).

Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro/kecil karena *transaction cost*-nya sangat tinggi. Selain itu pada lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan modal, maupun kelayakan usaha, persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal (Susila, 2007: 225).

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar (Ashari, 2006: 162). Menurut Krisnamurti, dalam Ashari (2006: 153) menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan mikro, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Sektor pertanian tentu saja akan tetap menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah kredit mikro. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai jenis kreditnya ditawarkan ke petani,

tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan (Rozany, 2006 dalam Putra, 2012).

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumberdana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal (Ashari, 2006: 147).

Lemahnya permodalan pelaku ekonomi telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya pemerintah terdorong untuk meluncurkan beberapa kredit program yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil dan mikro sejak Repelita I (Ashari, 2006: 146). Pemberian kredit yang diberikan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan usahatani ialah bersifat simpan pinjam.

Prosedur/ administrasi peminjaman yang dilakukan LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Diantara keunggulan tersebut, misalnya tidak adanya persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan informal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan *cashlow* peminjaman (Susila, 2007: 226).

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argument tersebut. *Pertama*, LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. *Kedua*, Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. *Ketiga*, Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. *Keempat*, dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu. *Kelima*, adanya keterkaitan

sosial-budaya serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Susila, 2007: 226)

Sesuai dengan tujuan PUAP yaitu untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani, maka diharapkan dana PUAP yang diterima Gapoktan dapat dikelola dengan baik dalam upaya pencapaian terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan dana BLM-PUAP pada tahun 2008 yang diperuntukan kepada seluruh gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) di Indonesia sebesar Rp 100.000.000 yang merupakan dana awal yang diberikan oleh pemerintah untuk bantuan modal dan kegiatan usahatani. Dana tersebut diberikan secara bertahap, untuk LKM-A Anduring yang terdapat di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji mendapatkan bantuan dana PUAP pada tahun 2011 bersama gapoktan lainnya (Lampiran 2).

Dalam kegiatan usahatani penggunaan pupuk sangat mempengaruhi tingkat produksi dari tanaman, seberapa tepat tingkat penggunaan pupuk pada saat kegiatan usahatani padi perlu dilakukan penelitian sehingga dapat diketahui apakah petani padi yang melakukan peminjaman dan tidak melakukan peminjaman dapat menggunakan pupuk tersebut sesuai dengan prinsip 6T (Tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga) dan apakah akan berpengaruh terhadap tingkat produksi. Selain itu juga perlu dilihat besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, penerimaan dan pendapatan yang dihasilkan terhadap biaya yang dikeluarkan petani di kelurahan Anduring perlu dilakukan penelitian sehingga dapat diketahui manakah yang lebih menguntungkan bagi petani jika petani memperoleh modal dengan cara melakukan peminjaman atau petani yang hanya memperoleh modal dengan kegiatan usahatani musim panen sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Kuranji merupakan salah satu Kecamatan di Kota Padang yang merupakan produksi padi sawah tertinggi. Adapun produksi padi yang dihasilkan oleh Kecamatan Kuranji ini pada tahun 2014 yaitu dengan total produksi 29.309 ton (Lampiran 3). Dalam memenuhi kebutuhan usahatani padi sawah di kelurahan Anduring, kecamatan Kuranji ini petani dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu petani yang meminjam pada lembaga keuangan mikro agribisnis dan

petani yang tidak meminjam pada lembaga keuangan mikro agribisnis. Melihat adanya masalah yang dihadapi petani dalam permodalan, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan yang tertulis pada pedoman PUAP (2011) yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan ((Kusumaningtyas dan Kuswanti, 2012: 70).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) Anduring, LKM-A ini berdiri semenjak tahun 2011 bersamaan dengan diluncurkannya program pemerintah yaitu dana BLM-PUAP. LKM-A ini memiliki ketentuan dalam peminjaman kredit yaitu anggota yang telah terdaftar sebagai anggota Gapoktan Anduring, diwajibkan membayar iuran wajib sebesar Rp 5.000,- perbulan, simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- dan iuran pokok khusus sebesar Rp 100.000,- dimana anggota yang membayar iuran pokok khusus ini mendapatkan satu lembar sertifikat saham,, yang dipergunakan untuk penambahan dana pada LKM-A. Dana pinjaman yang diberikan kepada anggota LKM-A sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani dan kelancaran petani dalam membayar uang yang telah dipinjamkan secara tepat waktu sesuai dengan periode yang telah disepakati. Periode pengembalian pinjaman terdiri dari mingguan, bulanan, dan per musim panen. Hal ini tergantung pada permintaan peminjam dalam memilih periode pinjaman, namun rata-rata petani padi melakukan periode pengembalian setiap musim panen, dimana anggota LKM-A yang melakukan meminjam dikenakan bunga sebesar 1,5% perbulan dari jumlah pinjaman. Nasabah yang terdaftar pada LKM-A ini terdiri dari beberapa petani yang melakukan usahatani padi sawah, hortikultura dan UKM pemasaran hasil pertanian. Anggota baru yang telah terdaftar di LKM-A ini dapat melakukan peminjaman jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus LKM-A.

LKM-A Anduring merupakan wadah untuk menyalurkan pinjaman kepada petani, dimana dana tersebut digunakan untuk modal dan kegiatan usahatani. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan yang telah terdaftar sebagai anggota LKM-A Anduring. Gapoktan Anduring terdiri dari kelompok tani Sumber Jaya, kelompok tani Parak Jigarang I, dan kelompok tani Parak Jigarang II, berdasarkan data Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sumatera Barat, LKM-A Anduring pada tahun 2015 merupakan salah satu tingkat pengembalian dana tertinggi di kota Padang yaitu sebesar Rp 179,450,000,- dari dana awal sebesar Rp 100,000,000,- yang telah diterima pada tahun 2011 (lampiran 2).

Terdapat Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring yang menyediakan peminjaman kredit kepada petani. Dalam kegiatan simpan pinjam, nasabah LKM-A dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan usahatannya. LKM-A Anduring berperan sebagai pemberi peminjaman kredit berupa uang sebagai modal kepada petani untuk melakukan kegiatan usahatannya dengan persyaratan yang mudah dan tanpa adanya agunan. Sehingga petani lebih mudah untuk melakukan peminjaman, namun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengurus LKM-A tersebut, belum banyak diketahui oleh petani, sehingga masih ada petani yang beranggapan peminjaman yang dilakukan pada LKM-A sama dengan yang dilakukan oleh Bank.

Keberadaan kredit sangat dibutuhkan oleh petani untuk tujuan produksi. Pengadaan faktor produksi seperti: tanah, modal, tenaga kerja, serta pengelolaan usahatani yang tidak optimal menyebabkan rendahnya produksi padi. Hal tersebut dikarenakan upah yang mahal, dan kesempatan kerja terbatas di luar musim tanam, sebagian besar petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari satu musim ke musim lainnya, sedangkan modal untuk melakukan kegiatan usahatani semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan kredit menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan usahatani.

Terdapatnya kredit macet pada LKM-A Anduring ini menyebabkan anggota yang ingin meminjam dana harus mengantri terlebih dahulu dengan cara mencatat nama pada kertas yang telah disediakan oleh pengurus LKM-A, hal ini dapat mengakibatkan peminjaman diproses lama. Dana yang disalurkan oleh LKM-A diharapkan dapat memenuhi modal petani dalam kegiatan pertanian, dapat memperbaiki faktor produksi kegiatan pertanian berupa pengadaan benih,

penggunaan pupuk, penggunaan obat anti hama, dan penggunaan teknologi yang dimulai dari penanaman, pengairan, hingga panen. Dengan menggunakan modal yang cukup, dan penggunaan teknologi, dapat meningkatkan produksi tanaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh petani.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua kelompok tani setempat, masih ada petani yang tidak melakukan peminjaman pada lembaga keuangan mikro, hal ini terjadi karena mereka takut tidak bisa mengembalikan pinjaman, selain itu mereka beranggapan proses peminjaman yang dilakukan pada LKM-A tersebut sama dengan lembaga perbankan yang berbadan hukum, dimana terdapatnya agunan, sehingga jika tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan tersebut akan diambil oleh pengurus. Sedangkan petani yang melakukan peminjam kredit pada LKM-A digunakan untuk modal kegiatan usahatani, hal ini terbukti dengan adanya surat perjanjian yang ditanda tangani oleh nasabah dan pengurus yang menyatakan bahwa modal yang diberikan pinjaman adalah untuk kegiatan usahatani.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan pendapatan, dan keuntungan petani padisawah yang meminjam dan tidak meminjam kredit pada lembaga keuangan mikro agribisnis?
2. Bagaimana penggunaan pupuk, jumlah produksi dan struktur biaya usahatani padi sawah yang meminjam dan tidak meminjam kredit pada lembaga keuangan mikro agribisnis?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Petani Padi Sawah yang Meminjam dan Tidak Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring di Kota Padang”**.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbandingan pendapatan, dan keuntungan usahatani padi sawah sebagai petani yang meminjam dan tidak meminjam kredit pada lembaga keuangan mikro agribisnis.
2. Membandingkan penggunaan pupuk, jumlah produksi, dan struktur biaya usahatani padi sawah sebagai petani yang meminjam dan tidak meminjam kredit pada lembaga keuangan mikro agribisnis.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna:

1. Bagi petani, yaitu sebagai masukan informasi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dari manfaat LKM-A sebagai penyedia modal untuk pengadaan dana usahatani.
2. Bagi dunia akademis, yaitu dapat menambah atau memperkaya ilmu dan informasi mengenai peminjaman kredit dan usahatani.

